

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang berbentuk kesatuan sehingga menimbulkan konsekuensi adanya pembagian kekuasaan dari pusat ke daerah. Setiap daerah akan memiliki pemerintahan daerah sendiri. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu unsur pemerintahan daerah bersama-sama dengan Kepala daerah. Pada gelaran pemilihan umum serentak nasional tahun 2019, DPRD merupakan salah satu kontestan. Keikutsertaan DPRD patut dipertanyakan jika melihat kedudukan DPRD yang sejatinya bagian dari unsur pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, menjadi menarik apabila menjelaskan kedudukan sejatinya DPRD dalam pemerintahan di Indonesia dengan keterkaitan DPRD dalam kontestasi pemilihan umum serentak nasional tahun 2019 serta menjelaskan alternatif model pemilu DPRD yang sesuai dengan bentuk negara.

Kata kunci : Negara Kesatuan, DPRD, Pemerintahan Daerah, Pemilihan Umum Serentak Nasional.

ABSTRACT

Indonesia is a country in the form of a unit that causes the consequences of the division of power from the center to the regions. Each region will have its own regional government. The Regional House of Representativ (DPRD) is an element of regional goverment together with the regional head. In the 2019 national simultaneous elections, the DPRD was one of contestants. The participation of the DPRD is questionable if it sees the position of the DPRD which is actually part of the regional government element. Therefore, it is interesting to explain the true position of the DPRD in goverment in Indonesia with the linkage of the DPRD in the 2019 national simultaneous general contestation and explaining alternative DPRD election models that are appropriate to the form of the state.

Keyword: *Unitary State, DPRD, Regional Government, National Simultaneous Elections.*